

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Terutama teknologi informasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu yang semakin kompleks dan memicu pola pikir manusia untuk dapat menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman pada sekarang ini. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas kehidupan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Teknologi komputer adalah salah satu contoh produk teknologi yang telah berkembang pesat yang dapat membantu mempermudah manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuannya tiap instansi atau perusahaan memerlukan sistem yang bisa mengatur semua proses bisnis yang terjadi pada instansi atau perusahaan. Dari mulai proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas/operasi organisasi sehari-hari, hal ini dapat dilakukan untuk mempercepat pekerjaan yang ada di dalam instansi atau perusahaan tersebut.

Otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK,SAP,2005). Sedangkan akuntabilitas itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,SAP,2005).

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu,

diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Salah satu perangkat lunak yang paling banyak digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menyusun laporan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Laporan keuangan daerah merupakan produk akhir pengelolaan keuangan daerah yang sangat penting artinya bagi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk mendapatkan opini dari BPK-RI. Opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu unit organisasi berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah Kabupaten Gorontalo. Tugas Dinas PPKAD yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasar asas otonomi. Dinas PPKAD sudah berhasil dalam mengelola keuangan

daerah hal ini di buktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI perwakilan Gorontalo atas pemeriksaan LKPD tahun 2009 dan 2010.

Dinas PPKAD sudah memanfaatkan SIMDA dalam mengelola keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2006 hingga sekarang. Walaupun secara umum banyak manfaat yang ditawarkan oleh penerapan SIMDA antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, namun pengimplementasian SIMDA pada Dinas PPKAD juga memiliki kendala yang berkaitan dengan jaringan yang terganggu jika cuaca buruk, kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada menjadi penyebab buruknya pengelolaan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ridwan (2009) Pengaruh penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD pemerintah Indramayu). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis ingin meneliti tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis antara lain sebagai berikut :

1. Adanya gangguan jaringan SIMDA jika cuaca buruk, sehingga pekerjaan menjadi lamban dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan SIMDA.
2. Tahun 2009 dan 2010 laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tetapi pada tahun 2011 laporan keuangan pemerintah daerah hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis adalah seberapa besar pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yang terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Bagi masyarakat, sebagai sarana informasi mengenai sistem informasi manajemen daerah (simda) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, sebagai referensi dan pertimbangan dalam pengawasan jaringan SIMDA serta pengelolaan

keuangan daerah, sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan kegiatan publik untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

2. Sebagai pencerah bagi masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengkritisi dan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah sebab yang dikelola adalah dana masyarakat dan untuk masyarakat pula.